

DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJAPutu Ayu Lestari¹ Made Heny Urmila Dewi²**Article history:**

Submitted: 29 Juni 2023

Revised: 4 Januari 2025

Accepted: 24 Februari 2025

Keywords:

Education;

Gross Regional Domestic
Product;

Labor Absorptio;

Minimum Wage;

Abstract

Judging from the TPAK data in Indonesia, particularly in Bali Province, the labor force participation rate has continued to increase drastically, reaching its highest point in 2021 with 2,580,523 people. However, this sharp increase is not accompanied by sufficient labor absorption, leading to rising unemployment. Labor absorption in a region is influenced by several factors, including Gross Regional Domestic Product (GRDP), education, and minimum wages. This study aims to analyze the effects of GRDP, education, and minimum wages on employment in the districts/cities of Bali Province. The data collection method used is non-participatory observation, and the analysis technique applied is panel data regression. The results of this study indicate that GRDP, education, and minimum wages simultaneously influence employment. Partially, GRDP has a positive and significant effect on labor absorption, while the minimum wage has a negative but insignificant effect. Meanwhile, education has a positive but insignificant effect on employment. From a workforce perspective, this study suggests that the government should focus more on improving the quality of the working-age population by providing better educational services and implementing programs aimed at enhancing education

Kata Kunci:

Pendidikan;

Penyerapan Tenaga Kerja;

Produk Domestik Regional
Bruto;

Upah Minimum;

Abstrak

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia khususnya Provinsi Bali terus mengalami peningkatan drastis yakni tertinggi pada tahun 2021 sebesar 2.580.523 orang. Peningkatan drastis ini tidak diimbangi dengan penyerapan dari tenaga kerja yang akan menyebabkan timbulnya pengangguran. Penyerapan tenaga kerja di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan, dan upah minimum. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis pengaruh PDRB, pendidikan, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi non partisipasi dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menemukan hasil Produk Domestik Regional Bruto, pendidikan, dan upah minimum secara simultan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, upah minimum dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Saran dari penelitian ini untuk aspek tenaga kerja, diharapkan pemerintah lebih berfokus meningkatkan kualitas masyarakat khususnya penduduk usia kerja dengan memberikan layanan pendidikan dan program peningkatan pendidikan.

Correspondence:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana, Bali,

Indonesia

Email: ayul3426@gmail.comFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia²Email: henny.urmila@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja yang bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran semakin tinggi. Dalam pembangunan ekonomi ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki beberapa permasalahan dalam ketenagakerjaan. Ketersediaan sumber daya manusia di Indonesia sudah potensial, namun tersedianya lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk menjadi salah satu kendala. Ketidakseimbangan ini yang dapat memicu meningkatnya pengangguran di Indonesia (Nasution, 2015). Permasalahan pengangguran di Indonesia berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja diartikan sebagai jumlah lapangan kerja yang terisi yang dicerminkan dari jumlah penduduk bekerja.

Selain itu, pemahaman mendalam tentang dinamika ketenagakerjaan membantu dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suhandi dkk. (2021) menekankan bahwa pengangguran perlu dikurangi melalui penciptaan lapangan kerja guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Yusdiansyah dan Sumanto (2022) menemukan bahwa kesejahteraan pekerja, yang mencakup aspek gaji, pendidikan, dan kesehatan, berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kerja tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian dalam bidang ketenagakerjaan sangat penting untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja dan merumuskan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan terkait.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), TPAK di Indonesia sebesar 68,63 persen pada Agustus 2022, BPS mendefinisikan TPAK sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Tingginya nilai TPAK, maka jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk melakukan produksi barang dan jasa dalam perekonomian juga tinggi. Namun banyaknya pasokan tenaga kerja yang ada tidak diimbangi dengan penyerapan dari tenaga kerja sehingga menyebabkan timbulnya pengangguran. Semakin tinggi angka pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena sosial-ekonomi di masyarakat.

Provinsi Bali merupakan provinsi yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan Indonesia, khususnya sektor pariwisata. Bali sebagai sektor utama untuk pembangunan perekonomian khususnya dalam sektor pariwisata, Bali diharapkan mampu membantu permasalahan ekonomi yang terjadi dengan memperluas kesempatan kerja, berusaha, dan meratakan pendapatan masyarakat. Keindahan Bali yang menjadikan industri pariwisata sebagai sektor utama sehingga industri pariwisata menjadi penggerak dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat di dalam maupun di luar Bali.

Kondisi ketenagakerjaan di Bali termasuk cukup baik. Permasalahan ketenagakerjaan masih banyak di temui selain pengangguran, yakni jumlah tenaga kerja, upah, dan kualitas tenaga kerja yang berkaitan dengan pendidikan (Wiasih & Karmini, 2021). Angkatan kerja Provinsi Bali cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Jumlah angkatan kerja paling tinggi yaitu pada tahun 2021. Meskipun cenderung terjadi peningkatan angkatan kerja yang diikuti dengan meningkatnya penduduk yang bekerja, tetapi penduduk yang menganggur juga semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah angkatan kerja yang menganggur pada tahun 2020 meningkat menjadi 144.500 orang dari 39.288 pada tahun 2019. Peningkatan drastis pengangguran dari angkatan kerja tahun 2020 karena faktor adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap semua lapangan kerja di Provinsi Bali terutama pada sektor pariwisata.

Adanya angkatan kerja yang masih menganggur artinya masih ditemukan permasalahan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Artinya terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan

permintaan akan tenaga kerja. adanya angkatan kerja yang menganggur di Provinsi Bali disebabkan oleh lebih kecilnya permintaan dibanding penawaran terhadap tenaga kerja sehingga terjadi *excess supply of labor*. Kecilnya permintaan akan tenaga kerja menyebabkan banyak angkatan kerja tidak terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

Penyerapan tenaga kerja di suatu daerah juga dipengaruhi faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai tambah yang dimiliki dari penghasilan barang atau jasa dari berbagai sektor suatu daerah ataupun unit produksi pada jangka waktu tertentu disebut PDRB. Jumlah angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh PDRB karena jika PDRB mengalami peningkatan, maka jumlah nilai tambah penjualan atau output perusahaan dari suatu wilayah akan meningkat pula. Penjualan atau output dari perusahaan yang semakin besar maka akan membuat perusahaan menambah tenaga kerja yang dimilikinya untuk mencapai peningkatan produksinya karena adanya peningkatan penjualan (Feriyanto, 2014: 43). Hal ini lah yang secara langsung mampu memberikan peningkatan terhadap tenaga kerja. PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Bali periode tahun 2012-2021 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 hingga tahun 2019 PDRB Atas Dasar Harga Konstan terus meningkat dan tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 162.693,36 milyar rupiah. Namun, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami penurunan menjadi 143.870,40 milyar rupiah pada tahun 2021. Menurunnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 dan tahun 2021 diakibatkan oleh adanya dampak dari pandemi Covid-19. Output yang diproduksi meningkat, sehingga orang yang akan dipekerjakan juga meningkat. Hal ini berkaitan dengan konsep fungsi produk yakni output yang meningkat dapat tercapai jika adanya peningkatan input tenaga kerja. Dalam suatu perekonomian, permintaan barang dan jasa berpengaruh dalam tingkat output penjualan dan input tenaga kerja.

Salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga modal pembangunan jangka panjang yaitu pendidikan. Kualitas suatu pendidikan dapat diukur dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka akan semakin berkualitas seseorang dan memiliki kualitas dalam bekerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rentan waktu 2012-2021 kondisi pendidikan di Provinsi Bali cenderung meningkat setiap tahunnya (BPS, 2022). Dilihat dari rata-rata lama sekolah, Provinsi Bali termasuk provinsi dengan rata-rata lama sekolah yang meningkat setiap tahunnya tetapi masih tergolong rendah. Rata-rata lama sekolah Provinsi Bali masih berada di bawah 12 tahun dan ini masih berada dibawah wajib belajar yaitu 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan tersedianya sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang berkualitas akan dapat mengurangi pengangguran, jika tersedianya lapangan kerja.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah besarnya tingkat upah minimum. Tingkat upah juga sebagai salah satu pemicu meningkatnya penyerapan tenaga kerja, dengan tingkat upah yang sesuai dengan penetapan pemerintah ataupun lebih tinggi akan berpengaruh terhadap orang yang tertarik untuk bekerja (Alghofari, 2009). Tenaga kerja biasanya menjadikan upah sebagai acuan untuk bekerja di perusahaan dan semangat kerja serta produktivitas yang dimiliki. Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 menjelaskan acuan upah yang diberikan setiap kota/kabupaten memberlakukan UMK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan landasan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di setiap daerah.

Berdasarkan data BPS (2022) memperlihatkan upah minimum Provinsi Bali memiliki peningkatan yang signifikan setiap tahun. Upah minimum tertinggi tahun 2021 berada di Kabupaten Badung sedangkan terendah ditahun 2021 di Kabupaten Bangli. Peningkatan upah ini memiliki prospektif untuk tenaga kerja yang ingin mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Tersedianya kebijakan untuk upah minimum ini juga meningkatkan upah perkapita yang diperoleh pekerja (Wasilaputri, 2016). Adanya kenaikan upah minimum juga akan berdampak berkurangnya penyerapan tenaga kerja, sesuai dengan teori ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa permintaan

tenaga kerja memiliki banding yang terbalik terhadap upah, namun perusahaan dengan keinginan keuntungan yang maksimal dapat memilih jumlah tenaga kerja dan nilai pertambahan marginal tenaga kerja dikali dengan harga per unit penjualan sama dengan upah.

Pemerintah memberikan kebijakan adanya upah minimum agar tidak terjadinya masalah pada ketenagakerjaan (Dewi, 2019). Dengan upah minimum yang meningkat daripada upah sebelumnya, maka rendahnya permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Begitupun sebaliknya, jika upah minimum rendah dari pada sebelumnya maka perusahaan akan menyediakan permintaan tenaga kerja yang lebih banyak, Asumsi harga input lain tetap sehingga upah tenaga kerja akan meningkat pula yang mengakibatkan perusahaan mengurangi permintaan tenaga kerja dan menggunakan faktor produksi yang memiliki harga yang lebih murah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto, pendidikan, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali yang dibagi menjadi 9 kabupaten/kota. Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Bali karena permasalahan ketenagakerjaan masih banyak di temui selain pengangguran, yakni jumlah tenaga kerja, upah, dan kualitas tenaga kerja yang berkaitan dengan pendidikan. Penelitian ini menggunakan data tahun 2012 sampai dengan 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi non partisipasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial yang terdiri dari model regresi data panel yang menggabungkan *data time series* dengan data *cross section* yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, *Random Effect Model (REM)*, serta menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Parameter. Model regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Penyerapan tenaga kerja
- X₁ = Produk Domestik Regional Bruto
- X₂ = Pendidikan
- X₃ = Upah minimum
- ε_{it} = *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyerapan tenaga kerja yakni kebutuhan jumlah tenaga kerja yang diperlukan atau digunakan dalam suatu perusahaan. Semakin banyak penduduk bekerja artinya semakin besar tenaga kerja yang terserap. Tenaga yang bekerja akan memiliki dampak untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang banyak, dengan adanya tenaga kerja akan membantu roda perekonomian suatu daerah sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan penyerapan tenaga kerja.

Perkembangan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di Provinsi Bali paling tinggi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 2.525.707 orang dengan TPAK sebesar 76,78 persen, namun pada tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat semua sektor termasuk sektor pariwisata mengalami penurunan. Dilihat dari banyaknya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang

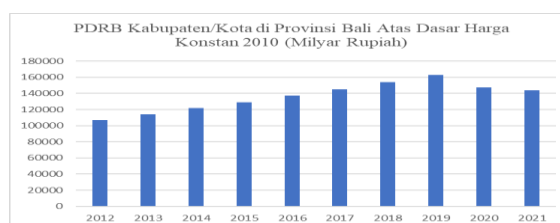
bekerja, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Menurut sumber Badan Pusat Statistik, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali masih jauh berada di bawah Provinsi Jawa Timur yang jumlah penyerapan tenaga kerjanya mencapai 21 juta orang sedangkan di Provinsi Bali jumlahnya masih 2,4 juta orang.

Provinsi Bali memiliki sembilan kabupaten, Kota Denpasar memiliki jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya setiap tahun. Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali di mana banyak sektor yang berkembang di Kota Denpasar sehingga penduduk yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kabupaten Klungkung memiliki jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja yang paling rendah setiap tahunnya.

Perkembangan penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha di Provinsi Bali cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja lebih banyak terserap pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor meskipun tidak selalu terjadi kenaikan setiap tahunnya. Sektor kedua yang banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Bali adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Perkembangan penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Provinsi Bali cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja lebih banyak bekerja sebagai buruh atau karyawan. Hampir setengah dari seluruh jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja bersatus pekerjaan menjadi buruh. Status pekerjaan pekerja bebas pertanian hanya sedikit terserap di Provinsi Bali dibandingkan dengan status pekerjaan lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga barang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Gambar 1 adalah grafik yang menunjukkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Bali tahun 2012-2021. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Bali berfluktuasi setiap tahunnya. PDRB di Provinsi Bali paling tinggi pada tahun 2019 yaitu 162.693,36 milyar rupiah. Menurut data Badan Pusat Statistik (2021) Provinsi Bali masih berada pada urutan ke-18 diantara provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. PDRB Provinsi Bali masih jauh jika dibandingkan dengan Provinsi sekitarnya seperti Provinsi Jawa Timur yang berada di urutan ke-2. Meskipun Provinsi Bali merupakan provinsi dengan sektor pariwisata yang sangat berkembang namun PDRB di Provinsi Bali masih terbilang rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

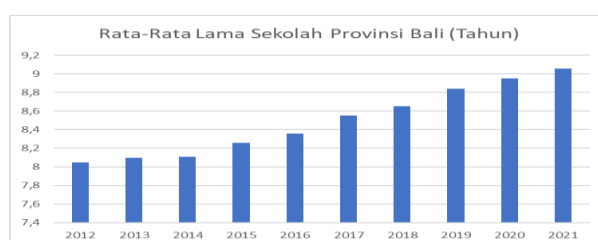
Gambar 1.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Bali Tahun 2012-2021

Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan PDRB yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Tingginya PDRB Kabupaten Badung dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali karena Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan sektor pariwisata yang paling berkembang dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. PDRB di

Kabupaten Badung tertinggi pada tahun 2019 yaitu 37.326,47 milyar rupiah. Sedangkan Kabupaten Bangli memiliki PDRB yang paling rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. PDRB di Kabupaten Bangli pada tahun 2021 yaitu 4.384,47 milyar rupiah. Kabupaten Bangli menjadi kabupaten dengan PDRB terendah karena sektor pariwisata maupun sektor lainnya tidak terlalu berkembang. Tingginya tingkat PDRB sehingga pendapatan masyarakat mengalami peningkatan yang mengakibatkan daya beli masyarakat semakin besar dan mampu menciptakan kesempatan kerja karena meningkatnya permintaan terhadap barang industri.

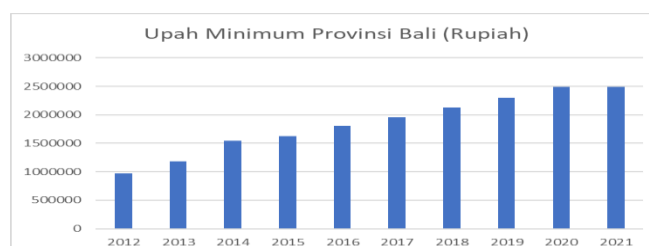
Pendidikan merupakan sebuah tujuan pembangunan dan kunci utama yang menunjukkan kemampuan dari suatu negara dalam menggunakan teknologi masa kini untuk mengembangkan kapasitas yang ada untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang sumber daya manusia, yang mana investasi tersebut dinamakan dengan *Human Capital* (teori modal manusia). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2012-2021

Gambar 2 menunjukkan rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali tahun 2012-2021. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu dari 8,05 tahun pada tahun 2012 menjadi 9,06 tahun pada tahun 2021. Jika dilihat dengan seksama peningkatan rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali tidak konsisten setiap tahunnya. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali masih dibawah 12 tahun. Kota Denpasar sebagai kota dengan rata-rata lama sekolah paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Rata-rata lama sekolah Kota Denpasar tertinggi pada tahun 2021 yaitu 11,48 tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah di Kota Denpasar juga masih berada di bawah tahun minimal usia bersekolah. Sedangkan Kabupaten Karangasem memiliki rata-rata lama sekolah yang paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Rata-rata lama sekolah yang ditamatkan oleh individu atau seseorang akan meningkatkan kualitas kemampuan dalam bekerja. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat yang diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki, maka diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran, jika tersedianya lapangan pekerjaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 4.
Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2012-2021

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan pemerintah akan berpengaruh terhadap jumlah orang yang bekerja Alghofari (2009). Pemerintah memberlakukan upah minimum sebagai upaya mengatasi permasalahan mengenai tenaga kerja. Peningkatan upah minimum dari sebelumnya, maka permintaan tenaga kerja dari perusahaan akan menurun. Begitupun sebaliknya, jika upah minimum yang lebih rendah maka permintaan tenaga kerja dari perusahaan akan meningkat. Perkembangan tingkat upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 upah minimum Provinsi Bali yaitu sebesar 2.493.523 rupiah dan pada tahun 2021 tidak terjadi peningkatan upah minimum Provinsi Bali. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata upah minimum provinsi (UMP) di seluruh Indonesia mencapai Rp2,72 juta. Artinya upah minimum Provinsi Bali masih berada di bawah rata-rata upah minimum nasional. Upah minimum Provinsi Bali berada di urutan ke-22 dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Upah minimum di Provinsi Bali terbilang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Provinsi DKI Jakarta dengan upah minimum sebesar 4.416.186 rupiah. Kabupaten Badung menjadi kabupaten dengan upah minimum terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan perkembangan sektor pariwisata yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Pada tahun 2021 upah minimum Kabupaten Badung yaitu sebesar 2.930.093 rupiah. Sedangkan Kabupaten Bangli merupakan kabupaten dengan upah minimum terendah di Provinsi Bali yaitu sebesar 2.494.810 rupiah pada tahun 2021. Kabupaten Bangli menjadi kabupaten dengan upah minimum terendah karena pariwisata tidak terlalu berkembang seperti di Kabupaten Badung. Selain itu, industri lainnya tidak terlalu banyak berada di Kabupaten Bangli.

Tabel 1.
Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	324,641	(8,78)	0,000
Cross-section Chi-Square	318,154	8	0,000

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji chow pada Tabel dapat dilihat bahwa nilai probability cross-section chi-square $< 0,05$ yaitu 0,00, ini berarti H_0 ditolak dan model terbaik adalah *fixed effect model*.

Tabel 2.
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-S1. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	13,636	3	0,003

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji hausman Tabel 2 dilihat bahwa nilai *probability cross section random* $< 0,05$, ini berarti H_0 ditolak dan model terbaik adalah *fixed effect model*. Dari hasil uji Chow dan uji Hausman yang telah dilakukan, *fixed effect model* (FEM) terpilih menjadi model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini, sehingga tidak perlu melakukan uji *Lagrange Multiplier*.

Hasil uji normalitas diperoleh bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* pada model estimasi adalah sebesar 0,642. Nilai tersebut terbukti lebih besar dari taraf nyata lima persen ($0,642 > 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa data pada model estimasi sudah memenuhi asumsi normalitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai residual pada model estimasi yang telah terstandarisasi sudah berdistribusi normal. Hasil uji multolinieritas diperoleh hasil bahwa nilai koefisien korelasi variabel X_1 , X_2 , dan X_3

< 0,80. Dengan demikian model regresi ini terbukti tidak memiliki masalah multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi diperoleh nilai *upper bounge* (dU) sebesar 1,726 dan 4-dU sebesar 2,274. Dengan menggunakan analisis nilai Durbin-Watson didapatkan hasil nilai dU < dw < 4-dU dapat dilihat 1,726 < 1,997 < 2,274 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokolerasi dalam model. Hasil uji heteroskedastisitas yang sudah dilakukan didapat bahwa nilai probabilitas *chi square*-nya lebih besar dari taraf nyata lima persen ($0,059 > 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa model estimasi sudah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3.
Hasil Uji F (Simultan)

R-squared	0,994	Mean dependent var	12,375
Adjusted R-Squared	0,994	S.D. dependent var	0,478
S.E. of regression	0,038	Akaike info criterion	-3,554
Sum squared resid	0,115	Schwarz criterion	-3,221
Log likelihood	171,933	Hannan-Quinn criter	-3,420
F-statistic	1243,521	Durbin-Watson stat	1,357
Prob(F-statistic)	0,000		

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil uji F, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *F-statistic* lebih kecil dari taraf nyata lima persen ($0,00 < 0,05$) dan $F_{hitung} 1243,521 > F_{Tabel} 3,10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1), pendidikan (X_2), dan upah minimum (X_3) pada penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Tabel 4.
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	12,281	0,373	32,889	0,000
X1	1,24E-05	2,70E-07	4,596	0,000
X2	0,043	0,022	1,934	0,057
LOG X3	-0,030	0,037	-0,827	0,410

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil Tabel 4 dapat dilihat persamaan regresi yakni $\text{Log } Y = 12,28 + 1,24 X_1 + 0,043 X_2 - 0,003 \text{Log} X_3$. Penggunaan logaritma pada variabel Y dan X_3 saja digunakan untuk mengubah data yang pada awalnya berdistribusi menceng atau tidak berdistribusi normal menjadi atau mendekati distribusi normal. Situasi terdapatnya hubungan yang tidak linier antara variabel penjelas (independen) dengan variabel terikat (dependen), maka transformasi logaritma yang dilakukan akan membuat hubungan yang tidak linier dapat digunakan dalam model linier.

Jika melihat nilai signifikansi per variabel berdasarkan nilai probabilitas t (P-value) nya, maka variabel independen yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen pada Tabel 4 adalah Produk Domestik Regional Bruto. Adapun nilai probabilitas variabel Produk Domestik Regional Bruto adalah $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel pendidikan dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas t (*P-value*) variabel pendidikan dan upah minimum lebih tinggi dari taraf signifikansi lima persen.

Hasil uji Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* pada model estimasi adalah sebesar 0,993. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto, pendidikan,

dan upah minimum secara keseluruhan mampu menjelaskan variabel dependen penyerapan tenaga kerja sebesar 99,35 persen.

Hasil uji pada Tabel 4 variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 4,595 > t_{Tabel} 1,662$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Produk Domestik Regional Bruto (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Koefisien regresi variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) sebesar 1,24 yang artinya dengan asumsi variabel lain konstan, peningkatan 1 persen Produk Domestik Regional Bruto akan meningkatkan 1,24 persen penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ziyadaturrofiqoh dkk. (2018), Hafiz & Ria (2021), Indradewa & Natha (2015) yang menyatakan produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil uji pada Tabel 4 variabel pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0567 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,934 > t_{Tabel} 1,663$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya pendidikan (X_2) tidak signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Koefisien regresi variabel pendidikan (X_2) sebesar 0,043 yang artinya dengan asumsi variabel lain konstan, peningkatan 1 persen pendidikan akan meningkatkan 0,043 persen penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan namun dengan hasil yang tidak signifikan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetya (2021), Windayana & Darsana (2020), Sihombing (2017) yang menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil uji pada Tabel 4 variabel upah minimum memiliki nilai probabilitas sebesar $0,4107 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -0,827 > t_{Tabel} -1,663$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya upah minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Koefisien *upah minimum* sebesar -0,031 yang artinya dengan asumsi variabel lain konstan, adanya kenaikan upah minimum akan menurunkan 0,031 persen penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian sudah sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini, di mana upah minimum tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Buchari (2016) dan Rahayu (2020).

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini didasarkan bahwa semakin meningkatnya PDRB maka pendapatan masyarakat akan mengalami peningkatan. Pendapatan masyarakat yang meningkat akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang semakin besar sehingga menciptakan permintaan barang industri juga akan semakin besar yang akan menciptakan kesempatan kerja yang baru.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini didasarkan bahwa semakin tinggi tamatan tingkat pendidikan diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada dengan sumbu tersedianya lapangan pekerjaan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Tingkat pendidikan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja salah satunya disebabkan karena tersedianya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Meledaknya jumlah lulusan sarjana yang terlalu padat di bidang tertentu, akhirnya mengakibatkan kompetisi cukup tinggi serta membuat jumlah penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah permintaan tenaga kerja. Hasil yang tidak signifikan ini berarti bahwa pendidikan bukanlah faktor kunci untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini terjadi karena ketika upah minimum yang ditetapkan meningkat maka akan

menaikkan biaya produksi perusahaan. Dengan adanya kenaikan upah minimum juga akan berdampak berkurangnya penyerapan tenaga kerja, sesuai dengan teori ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja memiliki banding yang terbalik terhadap upah, namun perusahaan dengan keinginan keuntungan yang maksimal dapat memilih jumlah tenaga kerja dan nilai pertambahan marginal tenaga kerja dikali dengan harga per unit penjualan sama dengan upah. Selanjutnya perusahaan akan menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan dengan perubahan biaya tenaga kerja. Hasil yang tidak signifikan ini berarti bahwa kenaikan upah minimum bukanlah faktor utama yang dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Ketika upah minimum naik, perusahaan tidak akan langsung mengurangi jumlah tenaga kerjanya atau perusahaan tidak akan langsung melakukan PHK terhadap tenaga kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis yang telah dipaparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni produk domestik regional bruto, pendidikan, dan upah minimum secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Produk Domestik Regional Bruto secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Pendidikan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, serta upah minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/kota Provinsi Bali.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu dalam aspek tenaga kerja, diharapkan pemerintah memberi fokus lebih untuk peningkatan kualitas masyarakat khususnya penduduk usia kerja dengan memberikan layanan pendidikan dan program peningkatan pendidikan. Peningkatan pendidikan mampu memberikan peningkatan produktivitas dari tenaga kerja yang akan memberi kemudahan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai bidangnya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan. Peningkatan pendidikan akan sia-sia apabila tidak diikuti oleh perluasan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pemerintah Provinsi Bali hendaknya mendorong laju pertumbuhan PDRB di seluruh Kabupaten/Kota sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja disetiap kabupaten dan tidak terfokus hanya pada satu kabupaten saja. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaharui tahun penelitian agar lebih relevan dengan kondisi perekonomian terbaru, kemudian menambah variabel seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, modal, dan variabel-variabel bebas lainnya di luar dari penelitian ini.

REFERENSI

- Alghofari, F. (2009). Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2022). *Penduduk Usia Kerja 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2021*. BPS Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2022). *Tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2012-2021*. BPS Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2022). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2021*. BPS Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2022). *Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2012-2021*. BPS Provinsi Bali.
- Bagus, K., & Sudarsana, A. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat. *E-Jurnal EP Unud*, 10(1), hal 60-89. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/56902/38131>
- Buchari, I. (2016). Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015. Universitas Negeri Jakarta, website: <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>

- Dewi, M. B. K. (2019). Analisis dampak permintaan naiknya upah minimum terhadap perekonomian, hukum, dan kesejahteraan nasional. *Indonesian State Law Review*, 2(1), 88-104. Universitas Negeri Semarang. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.38447>
- Feriyanto, Nur. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hafiz, E.A. & Haryatiningsih, R. (2021). Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020. *Journal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(1), pp. 55–65. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.174>
- Inradewa, I Gusti Agung & Natha, Ketut Suardhika (2015). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 4 (8) pp 923-950. <https://www.neliti.com/publications/44563/pengaruh-inflasi-pdrb-dan-upah-minimum-terhadap-penyerapan-tenaga-kerja-di-provi>
- Nasution, A., (2015). The Role of Social Capital on Rural Household Poverty Reduction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*, 46(6), 122-140. <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3904>
- Neumark, David, & William W. (2007). Minimum Wages and Employment. *Journal of Foundations and Trends in Microeconomics* 3(1-2), 1-182. <https://doi.org/10.3386/w12663>
- Prasetya, A.A. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Skripsi Universitas Brawijaya
- Pratiwi, N. P. A., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(2). <https://doi.org/10.24843/BSE.2019.v24.i02.p05>
- Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Upah dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Development*, 8(2), hal 114-157. <https://doi.org/10.53978/jd.v8i2.155>
- Rakhmawati, Atifatur & Arfida. (2018). Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2 (1), 74-82. <https://doi.org/10.22219/jie.v2i1.6968>
- Sihombing. (2017). Determinan Persalinan Sectio Caesarea di Indonesia (Analisis Lanjut Data Riskesdas 2013). *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(1). 63-75. <https://doi.org/10.22435/kespro.v8i1.6641.63-75>
- Suhandi, S., Wiguna, W., & Quraysin, I. (2021). Dinamika permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.28>
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Noven, S. A. (2020). Dinamika Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 25(1). <https://doi.org/10.24843/BSE.2020.v25.i01.p02>
- Wasilaputri, F. R. (2016). Pengaruh upah minimum provinsi, PDRB dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(3), 293-250.
- Wiasih, P. & Karmini, N.L. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja, dan Tingkat Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(12). <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i12.p05>.
- Windayana, I.B.A & Darsana, I.B. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, UMK, Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(1), hal 57-72. <https://doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i01.p04>
- Yusdiansyah, M. F., & Sumanto, A. (2022). Pengaruh kesejahteraan tenaga kerja terhadap kinerja pada industri marmer UD Surya Onix. *Primanomics: Journal of Economics and Business*, 20(3), 1-18. <https://doi.org/10.47896/mb.v2i1.357>
- Ziyadaturrofiqoh, Zulfanetti and Safri, M. (2018) Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 7(1), pp. 13–22. <https://doi.org/10.22437/jels.v7i1.4514>